

ANALISIS STANDAR BELANJA DI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

(Fokus Pada Pola Perilaku Belanja)

A.Rezki Fauzia Basri

NPP.29.1350

Asdaf Kabupaten Bulukumba, Provinsi

Sulawesi Selatan

Program Studi Keuangan Publik

Email: arezkifauzia@gmail.com

ABSTRACK

Expenditure standard analysis (ASB) is a component that must be developed by each local government to be used as a reference in measuring performance and preparing the budget. Purpose: Bulukumba Regency has issued Regent Regulation No. 48 of 2020 concerning ASB, so regional officials are required to refer to the regulations to prepare RKA-SKPD to make it easier for the budget team to verify.

Method: This study uses a descriptive qualitative research method with inductive data collection techniques in the form of interviews, and documentation. By doing this research, it is hoped that regional government organizations (OPD) will use ASB in determining the budget in accordance with the shopping behavior pattern approach that uses Ritonga theory, namely ASB is determined using an intuitive approach, engineering analysis, and analysis of past spending data.

Result/findings: The results of the research that have been carried out show that in compiling ASB in Bulukumba Regency OPD which is focused on spending behavior patterns, namely preparing decision letters, budgets, and work contracts, it has gone well, because it is in accordance with physical ASB and non-physical ASB. as well as input and output indicators have also been realized by 100%. the same is true of past spending approaches which are not much different from the budget and realization in the previous year. Conclusion: The BPKD and the Bulukumba Regency Bappeda are expected to be able to maintain and continue the policies and steps that have been taken to prepare the budget according to the expenditure analysis approach as indicators contained in the pattern of spending behavior.

keywords: *expenditure standard analyst, expenditure behavior pattern*

ABSTRAK

Analisis Standar Belanja (ASB) adalah komponen yang harus dikembangkan setiap pemerintah daerah untuk dijadikan acuan dalam mengukur kinerja dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. **Tujuan:** Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 Tentang ASB, maka perangkat daerah diharuskan mengacu ke dalam peraturan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah agar memudahkan tim anggaran melakukan verifikasi. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif dengan Pendekatan Induktif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, serta dokumentasi. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan organisasi perangkat daerah (OPD) menggunakan ASB dalam menentukan anggaran sesuai dengan pendekatan pola perilaku belanja yang menggunakan Teori Ritonga, yaitu ASB ditentukan menggunakan Pendekatan Intuisi, Analisis *Engineering*, dan Analisis Data Belanja Masa Lalu. **Hasil/temuan:** Hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa dalam menyusun ASB di OPD Kabupaten Bulukumba yang difokuskan pada pola perilaku belanja yaitu menyusun surat keputusan, anggaran belanja, dan kontrak kerja telah berjalan dengan baik, karena sesuai dengan ASB fisik dan ASB non fisik. Serta indikator *input* dan *output* juga sudah terealisasi sebesar seratus persen. Sama halnya dengan pendekatan belanja masa lalu yang tidak jauh berbeda dengan anggaran serta realisasi pada tahun sebelumnya. Pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Kesimpulan: Kabupaten Bulukumba diharapkan dapat mempertahankan dan melanjutkan kebijakan serta langkah-langkah yang telah diambil untuk melakukan penyusunan anggaran sesuai pendekatan analisis belanja sebagai indikator-indikator yang terdapat di pola perilaku belanja

Kata kunci: Analisis Standar Belanja, Pola Perilaku Belanja

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan otonomi daerah yakni melaksanakan penyusunan anggaran keuangan daerah yang akan diukur realisasi program serta aktivitas pemerintah daerah yang nanti dijalankan sampai tahun berjalan maka tidak terjadi kecurangan/penyimpangan dalam menyusun anggaran (budgetary slack), maka pemerintah daerah selaku penyusun kebijakan memiliki peranan penting untuk membina dan mengawasi jalannya anggaran dengan menyusun ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor. 12 Tahun 2019 mengenai pengelolaan keuangan daerah dalam pasal 3 mengatakan jika pengelolaan keuangan

daerah dijalankan dengan ekonomis, efisien, transparan, efektif, tertib, serta bertanggungjawab dengan menjunjung tinggi perasaan keadilan, kepatutan, manfaat pada publik, dan patuh terhadap regulasi undang-undang. Proses dalam mengelola keuangan daerah yakni dimulai dari melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memuat mengenai program/kegiatan, anggaran, serta target kinerja yang akan dikerjakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penerapan penyusunan ASB pada Kabupaten/Kota dalam melakukan menyusun anggaran berlandaskan prestasi kerja nanti dapat terlihat dengan cara operasional apabila perangkat daerah mengajukan perencanaan kerja anggaran perangkat daerah. Penerapan anggaran berbasis kinerja, Pemda butuh memenuhi instrumen misalnya pencapaian kinerja, indikator dari kinerja, serta menganalisis standar dari belanja. Pemerintah daerah dapat dikatakan sukses untuk mengelola keuangan daerah serta melakukan komitmen guna menjalankan penganggaran berbasis kinerja, akan tetapi penggunaan konsep ASB berbasis kinerja belum diterapkan. Memakai standar harganya satuan serta standar biaya umum dalam penyusunan anggaran pada program kegiatan dan sub kegiatan. Menghasilkan data yang sangat penting untuk peneliti meneliti sebuah model Analisis Standar Belanja yang sama terhadap ciri-ciri implementasi aktivitas ataupun program di Pemkab Bulukumba.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Pandemi *Covid-19* mempengaruhi pada kehidupan bermasyarakat yang amat besar, termasuk di Kabupaten Bulukumba. Dampak pandemi ini sangat besar terhadap pembangunan bidang kesehatan, meskipun juga mempengaruhi aspek – aspek lainnya seperti perekonomian, sosial dan keuangan daerah. Sehingga, terdapat beberapa anggaran yang tidak tersalurkan baik dari segi infrastruktur, ekonomi, kesehatan, yang mengakibatkan belanja daerah cenderung menurun. Percepatan penanganan *Covid-19* di Daerah menyebabkan perubahan APBD termasuk pada APBD Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan data APBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 didapatkan data bahwa pendapatan sebesar Rp. 1.478.492.269.014,00 dan Belanja sebesar Rp. 1.247.418.027.138,00. Angka tersebut membuktikan bahwa pendapatan Kabupaten Bulukumba lebih besar dibandingkan belanja daerah, sehingga anggaran memiliki surplus sebesar Rp. 49.980.546.091,00. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat realisasi yang menurun sebab ada refocusing anggaran dalam pembiayaan Covid-19. Anggaran belanja tersebut menyebabkan adanya surplus di mana anggaran pendapatannya lebih banyak daripada anggaran belanjanya Kabupaten Bulukumba. Surplus anggaran ada bukan karena adanya kelebihan kas kabupaten melainkan dari besaran anggaran pendapatan yang lebih banyak dari anggaran belanjanya Kabupaten Bulukumba.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan optimalisasi pengelolaan aset.

Penelitian Damayasa (2013) berjudul Analisis Standar Belanja (ASB) Untuk Mencapai Penganggaran Berbasis Kinerja Pada Kabupaten Jembrana, menunjukkan bahwa Penelitian ini memakai cara *Activity Based Costing* (ABC). Hasilnya yang diperoleh bahwasannya terdapat aktivitas diklat serta empat belanja modal dalam SKPD terjadi *overfinancing*. Penelitian Yandra dan Sutrisna (2013) berjudul Penyusunan APBD Berbasis Kinerja menunjukkan Kajian yang dijalankan mengatakan bahwasannya variabel komitmen dari semua komponen organisasi, menyempurnakan sistem administrasinya serta sumber daya yang cukup tidaklah mempunyai pengaruhnya dalam menyusun APBD namun reward serta punishment memiliki pengaruh pada penyusunan APBD basisnya kinerja. Penelitian NAdir, Arif & Fatmawati (2020) berjudul Model Analisis Standar Belanja Dalam Kewajaran Anggaran (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Di Sulawesi Selatan) menemukan bahwa memiliki tiga tahapan dalam menyusun ASB yaitu tahap pengumpulan data, tahap pengelompokan kegiatan, tahap metode perhitungan. Hasil yang didapatkan adalah total dokumen serta individu mamiliki pengaruhnya pada keseluruhan anggaran serta model ASB menentukan tingkat kewajaran anggaran sebesar Rp. 12,6 juta, dan 30,4 juta.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukakn oleh penelitian terdahulu, dimana perbedaan terletak pada fokus dan Iokus peneItian, penulis mengambil judul Analisis Standar Belanja Di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba yang kemudian akan dibahas dan diukur menggunakan teori dari Ritonga (2010) mengenai Pola perilaku belanja yang difokuskan pada pola perilaku belanja terdiri dari pendekatan intuisi, pendekatan engineering, pendekatan analisis data dan belanja masa lalu. PeneItian ini akan dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan metode peneItian kualitatif deskriptif.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendekatan intuisi, pendekatan analisis engineering, dan pendekatan analisis data belanja masa lalu dalam menyusun Analisis Standar Belanja Di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan yang di fokuskan pada perilaku belanja.

II. METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Alasan dalam memilih model penelitian kualitatif, karena penyusunan analisis standar belanja terdapat pendekatan diskusi. Metode ini diharuskan peneliti mengumpulkan seluruh perangkat daerah untuk menentukan anggaran yang berpedoman pada analisis standar belanja yang berbasis kinerja. Terselenggaranya diskusi wawancara di Kabupaten Bulukumba, maka peneliti dan tim anggaran dapat mengetahui permasalahan – permasalahan yang ada pada perangkat daerah dalam menyusun anggaran yang berpatokan pada analisis standar belanja.

Data yang digunakan penulis adalah data primer dan data sekunder. Data primer langsung didapatkan dari Dinas Kesehatan dengan melakukan pengamatan (observasi), menemui para informan dan melakukan wawancara (interview), serta mengambil dokumentasi pada kegiatan penelitian tersebut. Data sekunder dalam penelitian ini yang didapatkan oleh peneliti berasal dari beberapa buku literatur, jurnal, referensi di perpustakaan, penelitian terdahulu, serta dari internet dengan sumber yang terpercaya. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang terdiri dari reduction, informasi display, dan conclusion drawing atau verification.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pendekatan Intuisi dalam Menyusun Analisis Standar Belanja Di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan Yang Di Fokuskan Pada Perilaku Belanja

Pola Perilaku Belanja merupakan suatu pola dari perubahan belanja yang memiliki hubungan dengan perubahan target kinerja atau kegiatan pemerintah daerah (misalnya jumlah peserta dan jumlah hari dalam sosialisasi peduli lingkungan). Banyak atau sedikitnya jumlah belanja memiliki kaitan tergantung dengan target kinerja kegiatan atau aktivitas pemerintah daerah. Sehingga dari uraian di atas kita dapat menyimpulkan jenis jenis belanja yaitu belanja tetap, belanja variabel dan belanja semi variabel. Pola perilaku belanja terdiri dari belanja tetap, belanja variabel dan belanja semi variabel. Penyusunan APBD Kabupaten Bulukumba dituangkan dalam Penjabaran APBD No 66 Tahun 2019 tertanggal 30 Desember 2022. Penyusunan APBD dimaksudkan untuk mendokumentasikan anggaran yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, maka peneliti menyimpulkan pola perilaku belanja yang ada di BKPD Kabupaten Bulukumba dibagi menjadi Belanja Tetap dan Belanja Variabel. Belanja tetap merupakan pengeluaran belanja yang rutin dan harus dikeluarkan seperti gaji pegawai setiap bulannya, sedangkan belanja variabel merupakan pengeluaran belanja didasarkan

pada kebutuhan per kegiatan atau program yang hal ini tidak selalu dikeluarkan setiap periode atau setiap bulan.

3.2 Pendekatan Analisis *Engineering* Dalam Menyusun Analisis Standar Belanja Di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan Yang Di Fokuskan Pada Perilaku Belanja

Penyusunan anggaran menggunakan pendekatan input atau anggaran awal. Nantinya hasil dari keluaran analisis standar belanja dapat dilihat melalui realisasi anggaran tahunan. Biasanya bisa berbentuk program atau permohonan anggaran kegiatan. Berdasarkan hasil observasi indikator pendekatan analisis *engineering* yang didapatkan peneliti, didapatkan hasil bahwa data dpa skpd bappeda tahun 2020 kabupaten bulukumba terdapat kesenjangan antara anggaran belanja sebelum perubahan dengan anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp. 99.565.500,00. Pendapatan sebesar Rp. 1.478.492.269.014,00 dan Belanja sebesar Rp. 1.247.418.027.138,00. Angka tersebut membuktikan bahwa pendapatan Kabupaten Bulukumba lebih besar dibandingkan belanja daerah, sehingga anggaran memiliki surplus sebesar Rp. 49.980.546.091,00.

Seluruh belanja daerah isinya yaitu belanja operasi (Program secara rutin perangkat daerah) dan belanja modal (Program jalan, irigasi serta jaringan, kegiatan pengadaan aset bergerak dan tidak bergerak) memiliki realisaasi yang menurun sebab ada refocusing anggaran dalam pembiayaan Covid-19. Anggaran belanja tersebut menyebabkan adanya surplus di mana anggaran pendapatannya lebih banyak daripada anggaran belanjanya Kabupaten Bulukumba. Surplus anggaran ada bukan karena adanya kelebihan kas kabupaten melainkan dari besaran anggaran pendapatan yang lebih banyak dari anggaran belanjanya Kabupaten Bulukumba. Pengukuran indikator kinerja pada tahun 2020, dilakukan pada tingkat indikator hasil (*outcome*) dan indikator keluaran (*output*) yang dibandingkan dengan indikator masukan (*input*). Sedangkan untuk indikator manfaat (*benefit*) dan Dampak (*impact*) masih belum terukur disebabkan karena untuk dapat mengukur itu diperlukan penelitian lebih mendalam terhadap manfaat dan dampaknya secara luas di masyarakat.

Aspek keuangan dari total anggaran untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 3.268.244.950,- dan sampai pada akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp. 3.156.365.275,- atau 96,58% dan fisik (kinerja) mencapai 98,26% atau dalam kategori berhasil. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran dari 10 program dan 45 kegiatan, 4 sasaran strategis, dan 6 indikator kinerja sasaran serta program dan kegiatan yang bersifat administrasi umum sebanyak 4 program dan 27 kegiatan menunjukkan rata-rata mencapai 99,78% dan fisik (kinerja) mencapai 100% atau dalam kategori berhasil.

3.3 Pendekatan Analisis Belanja Masa Lalu Dalam Menyusun Analisis Standar Belanja Di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan Yang Di Fokuskan Pada Perilaku Belanja

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 didapatkan bahwa aspek keuangan dari total anggaran untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 3.490.995.089,- dan sampai pada akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp. 3.398.097.878,- atau 97,34% dan fisik (kinerja) mencapai 99,76% atau dalam kategori berhasil. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran dari 10 program dan 49 kegiatan, 4 sasaran strategis, dan 6 indikator kinerja sasaran serta program dan kegiatan yang bersifat administrasi umum sebanyak 4 program dan 16 kegiatan menunjukkan rata-rata mencapai 91,82% atau dalam kategori berhasil.

Data aspek keuangan dari total anggaran untuk Belanja Langsung tahun 2020 adalah sebesar Rp. 3.268.244.950,- dan sampai pada akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp. 3.156.365.275,- atau 96,58% dan fisik (kinerja) mencapai 98,26% atau dalam kategori berhasil. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran dari 10 program dan 45 kegiatan, 4 sasaran strategis, dan 6 indikator kinerja sasaran serta program dan kegiatan yang bersifat administrasi umum sebanyak 4 program dan 27 kegiatan menunjukkan rata-rata mencapai 99,78% dan fisik (kinerja) mencapai 100% atau dalam kategori berhasil.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyusunan anggaran untuk tahun yang direncanakan harus dimulai dengan melihat prakiraan anggaran yang telah disusun saat menyusun anggaran tahun sebelumnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu kabupaten yang letaknya pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dimana daerah tersebut mempunyai sumber daya alam (SDA) yang bagus serta akan di kembangkan maka membutuhkan anggaran operasional yang tinggi, dengan adanya anggaran yang besar maka Kabupaten Bulukumba dapat berkembang dan akan menghasilkan pendapatan yang lebih baik dari sebelumnya. Dibutuhkan Konsep ASB di Kabupaten Bulukumba, agar anggaran yang akan dikeluarkan lebih terarah dan mendukung program, kegiatan pada perangkat daerah.

Regulasi yang telah ditetapkan dalam penyusunan ASB, dan masih kurang penelitian untuk upaya yang akan dilakukan dalam menyusun ASB. Kendala-kendala yang disebabkan dalam penyusunan ASB, sehingga peneliti ingin melakukan penelitian tentang penerapan model analisis standar belanja dalam program, aktivitas, dan sub kegiatan dalam perangkat daerahnya di Pemkab Bulukumba. Pemerintah daerah dapat dikatakan sukses untuk mengelola keuangan daerah serta melakukan komitmen guna menjalankan penganggaran berbasis kinerja, akan tetapi penggunaan

konsep ASB berbasis kinerja belum diterapkan. Memakai standar harganya satuan serta standar biaya umum dalam penyusunan anggaran pada program kegiatan dan sub kegiatan. Menghasilkan data yang sangat penting untuk peneliti meneliti sebuah model Analisis Standar Belanja yang sama terhadap ciri-ciri implementasi aktivitas ataupun program di Pemkab Bulukumba. dalam meneliti analisis standar belanja rata-rata hanya menggunakan data RKA dan DPA perangkat daerah. Maka dari itu peneliti akan memperkaya variabel yang akan digunakan agar dapat membuat penyusunan analisis standar belanja yang berbasis kinerja pada perangkat daerah di Kabupaten Bulukumba.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Ritonga. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Analisis Standar Belanja Di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba (Fokus Pada Pola Perilaku Belanja) .

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pendekatan intuisi dalam menyusun Analisis Standar Belanja di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba yang difokuskan pada pola perilaku belanja yang dilakukan dengan menyusun surat keputusan, anggaran belanja, dan kontrak kerja telah berjalan dengan baik karena OPD dalam menyusun anggaran karena telah mengacu pada peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan. Pendekatan analisis *engineering* dalam menyusun Analisis Standar Belanja Di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba yang di fokuskan pada perilaku belanja dilaksanakan dengan menganalisis *input* dan *output* anggaran belanja dapat dikatakan berhasil berdasarkan capaian masukan sebesar 100% yang sebanding dengan capaian keluar sebesar 100% sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pola perilaku belanja Kabupaten Bulukumba melalui analisis *engineering* dapat di katakan seimbang. Pendekatan analisis belanja masa lalu di Kabupaten Bulukumba masih digunakan pada OPD Bappeda. Karena dalam menentukan anggaran tahun berikutnya maka akan mengacu pada anggaran tahun sebelumnya walaupun ada kenaikan 50% dari anggaran tahun sebelumnya.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba sebagai model studi kasus yang

dipilih berdasarkan pendapat Ritonga

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Analisis Standar Belanja Di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba (Fokus Pada Pola Perilaku Belanja) .

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang banyak membantu dan membimbing serta memberi dukungan, motivasi dan doa kepada penulis selama ini. Maka dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada keluarga tercinta dan segenap pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba yang banyak membantu dan mensukseskan selama proses magang dan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. (2008). Auditing (Dasar - Dasar Audit Laporan Keuangan). Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Jakarta: STIE YKPN.
- Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moloeng, L. J. (1989). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2016). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Renyowijoyo, M. (2013). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ritonga, I. T. (2010). Analisis Standar Belanja : Konsep, Metode Pengembangan, dan Implementasi di Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM.
- Siregar, B., & Siregar, B. (2000). Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana (2nd ed.). Yogyakarta: BPF.
- Sugiyono. (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Darmayasa, I. N. (2013). Analisis Standar Belanja (ASB) untuk Mencapai Penganggaran Berbasis Kinerja pada Kabupaten Jembrana. Jurnal Akuntansi Politeknik Negeri Bali, 2, 154–166.
- Nadir, R., Arif, M. R., & Fatmawati. (2020). Modelling Analisis Standar Belanja Dalam Kewajaran Anggaran (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo di Sulawesi Selatan). Jurnal KRISNA, 11(2), 197–205.
- Widanarto, A. (2012). Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal dan Kinerja

Pemerintah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(1), 1–73.

Yandra, R., & Sutrisna, E. (2013). Penyusunan APBD Berbasis Kinerja. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(2), 119–218.

Yusdianto. (2015). Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang - Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 483–505



